

Sistem Ekonomi Pancasila Sebagai Landasan Ketahanan Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Filsafat Ilmu

Palupi Lindiasari S⁵ upies77@gmail.com

Abstract

This article aims to analyze the fundamental of the Pancasila economic system as a foundation for the resilience of the Indonesian economy in the perspective of National Resilience. The study method uses a philosophy of science approach through the ontological dimension. There are three elements to determine the essence of the Pancasila economy, namely: macroeconomics, microeconomics and literal meaning. In macro terms, Pancasila economic system is explained in the UUD 1945 chapter 33 verses 1 to 5, whose essence consists of two elements (dualism) in defining welfare, namely material (outwardly) and inner (spiritual) which must be achieved equally through Gotong Royong. Literally, the fundamental of the Pancasila economy consists of economic philosophy and Pancasila philosophy. The economy explain the needs of human life (individual households, families, and countries), while Pancasila is representative of the godly element of man. Therefore the Pancasila economic system is a system of household management (material) by godless people (prioritizing intelligence). The results of the study of micro-economic elements, defining godless humans as humans who run the Pancasila economy through the components of the human brain, namely the neo-cortex which describes an awareness of each individual in behaving as a godly human. It's mean that human behavior is compassionate which is implemented with a caring attitude or better known as mutual cooperation (Gotong Royong). The Pancasila economic system as the foundation of Indonesia's economic resilience is able to explain the strength or resilience of the state in maintaining economic stability which consists of two elements namely economic soft skills and economic hard skills. Both of these powers aim to realize inner and outer prosperity for all people without exception with equitable growth through mutual cooperation (Gotong Royong).

Keywords : *Pancasila Economy System, Mutual Cooperation (Gotong Royong), Material, Spiritual, Equitable Growth, National Resilience*

Artikel ini bertujuan untuk menganalisa hakekat sistem ekonomi Pancasila sebagai landasan ketahanan ekonomi Indonesia dalam perspektif ketahanan nasional. Metode kajian menggunakan pendekatan filsafat ilmu dalam dimensi ontologis. Terdapat tiga unsur yang digunakan untuk mengetahui hakekat dari ekonomi Pancasila, yaitu : makro ekonomi, mikro ekonomi dan arti harafiah. Secara makro, definisi sistem ekonomi pancasila dijelaskan dalam UUD Pasal 33 ayat 1 sampai 5, yang hakikatnya terdiri atas dua unsur (dualism) dalam mendefinisikan kesejahteraan, yakni materi (lahir) dan batin (rohani) yang harus dicapai secara merata melalui Gotong Royong. Secara harafiah, hakikat ekonomi Pancasila terdiri atas filsafat ekonomi dan filsafat Pancasila. Ekonomi menjelaskan kebutuhan hidup manusia (rumah tangga individu, keluarga, dan negara), sedangkan Pancasila merupakan representative dari unsur manusia yang bertuhan. Sehingga system ekonomi Pancasila merupakan suatu system pengelolaan rumahtangga (materi) oleh manusia yang bertuhan (mengedepankan akal). Hasil kajian unsur mikro ekonomi, mendefinisikan manusia yang bertuhan sebagai manusia yang menjalankan ekonomi Pancasila melalui komponen otak manusia, yakni neo-cortex yang menggambarkan suatu kesadaran setiap individu dalam berperilaku sebagai manusia yang bertuhan. Artinya perilaku manusia bersifat welas asih yang diimplementasikan dengan sikap peduli atau yang lebih dikenal dengan gotong royong. Sistem ekonomi Pancasila sebagai landasan ketahanan ekonomi Indonesia mampu menjelaskan kekuatan atau ketangguhan negara dalam menjaga stabilitas ekonomi yang terdiri dari dua unsur yakni soft skill ekonomi dan hard skill ekonomi. Kedua

⁵ Dosen Kajian Strategik Ketahanan Nasional SKSG, Universitas Indonesia

kekuatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran lahir dan batin bagi seluruh rakyat tanpa kecuali dengan pertumbuhan merata melalui Gotong Royong.

Kata Kunci : Sistem Ekonomi Pancasila, Gotong Royong, Materi, Batin, Pertumbuhan Merata, Ketahanan Nasional

Copyright © 2018 Jurnal Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. All rights reserved

1. Pendahuluan

Dinamika perekonomian dunia menggambarkan keterkaitan kondisi ekonomi antar negara. Hal ini terbukti dari gejolak ekonomi pada suatu negara berdampak pada negara lainnya. Krisis moneter yang terjadi di Indonesia tahun 1997-1998, dan terakhir krisis financial yang melanda Amerika berpengaruh secara tidak langsung terhadap perekonomian di Indonesia. Keterpurukan nilai tukar BathThailand menjadi salah satu penyebab eksternal terjadinya krisis moneter di Indonesia. Dan yang terbaru krisis ekonomi di Turki mengindikasikan adanya gejolak ekonomi di beberapa negara, salah satunya nilai tukar Rupiah yang mengalami pelemahan menjadi Rp. 14.651 per dolar AS (www.bbc.com 2018). Serta dampak perang dagang China dan Amerika disinyalir berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah hampir menyentuh angka Rp. 15.000 per dolar AS (Lavinda 2018). Hal ini menunjukkan di era keterbukaan ekonomi, setiap negara dituntut untuk mampu beradaptasi terhadap perubahan global yang dapat mengancam perekonomian domestic. Negara yang tidak cepat beradaptasi akan terkena imbas krisis ekonomi yang berkepanjangan, sebaliknya negara yang mampu bereaksi lebih cepat dan antisipatiflah yang mampu terus bertahan. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan ketahanan ekonomi negara yang solid, kokoh dan resisten terhadap perubahan-perubahan yang bersumber dari internal maupun eksternal.

Berdasarkan pandangan ekonomi mainstream (ekonomi kapitalis) menilai bahwa kekuatan ekonomi negara bersumber dari besaran pendapatan nasional. Sehingga semakin tinggi pertumbuhan ekonomi

mengindikasikan kemampuan tinggi dari negara dalam merespon perubahan global. Karena kekuatan materi menjadi kunci keberhasilan suatu negara dalam menjaga perekonomiannya, dalam hal mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Untuk mengetahui seberapa liberal suatu negara, Milton Friedman dkk membuat pengukuran indeks kebebasan ekonomi. Data indeks kebebasan ekonomi tahun 2017 (BA 2017) menunjukkan negara-negara peringkat 5 teratas yang tergolong liberal diantaranya Hongkong, kemudian disusul Singapore, New Zealand, Switzerland dan Australia. Negara pencetus sistem liberalis yakni Amerika menempati posisi ke -17 sebagai negara yang tidak sepenuhnya liberal (mostly free). Hal ini cukup mengherankan, mengingat Amerika sebagai negara pencetus sistem liberalisasi justru mengalami kemunduran dalam sistem liberalisasi ekonomi.

Di tahun 1980 hingga akhir tahun 2000, posisi Amerika masih tergolong negara yang menganut sistem liberal (*free*). Namun, setelah tahun 2000, tepatnya mulai tahun 2005 berlanjut hingga tahun 2017 dan sampai sekarang ini, Indeks kebebasan ekonomi Amerika terus mengalami penurunan. Tahun 2005 indeks kebebasan ekonomi Amerika senilai 7,9 menempati ranking 9 didunia, kemudian di tahun 2017 menjadi 7,51 dengan ranking ke-17. Penurunan tingkat liberalisasi yang cukup besar ini menempatkan Amerika tidak lagi menjadi negara yang murni 100% liberal. Mulai terdapat proteksi dalam menjalankan sistem ekonomi liberal.

China sebagai salah satu negara penganut sistem sosialis, dimana indeks kebebasan ekonomi China menunjukkan terus

mengalami keterbukaan ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai indeks kebebasan ekonomi di tahun 1980 sebesar 4,41 kemudian meningkat di tahun 1985 hingga tahun 2007 sebesar 6,41. Namun setelah krisis yang melanda Amerika akibat subprime mortgage, indeks kebebasan ekonomi China mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi 5,74 (skala dikonversi dari 100 menjadi 10). Artinya praktis di tahun 2005 dan 2007 China mengalami keterbukaan ekonomi yang cukup tinggi, sehingga masuk dalam kategori *moderately free*. Namun setelah tahun 2007, indeks kebebasan ekonomi China mengalami penurunan hingga di tahun 2017 menjadi negara yang termasuk kategori *mostly unfree*.

Berbeda dengan Indonesia, secara umum sejak tahun 1985 Indonesia masuk kategori negara *moderately free* dengan nilai kisaran di atas 6,1. Nilai indeks kebebasan ekonomi tertinggi terjadi di tahun 1995 di era orde baru. Namun setelah krisis moneter di tahun 1998, Indonesia mulai melakukan proteksi yang menyebabkan nilai indeks kebebasan ekonomi turun menjadi 5,98 di tahun 2000. Pada tahun inilah Indonesia termasuk dalam kategori negara yang *mostly unfree*. Akan tetapi seiring pemulihan ekonomi domestik yang membutuhkan suntikan dana dari luar negeri, menyebabkan indeks kebebasan ekonomi meningkat mulai tahun 2005 sebesar 6,42. Selanjutnya di tahun 2006 dan 2007 masing-masing senilai 6,36 dan 6,44. Di tahun 2017, Indonesia tetap menjadi negara dengan kategori *moderately free* dengan nilai indeks kebebasan ekonomi yang sedikit menurun menjadi 6,19.

Fenomena perubahan sistem ekonomi yang dialami Amerika dan China menunjukkan bahwa sistem ekonomi liberal tidak sepenuhnya di adopsi oleh kedua negara. Disaat China membuka perekonomiannya, produk China lebih kompetitif dan mampu menguasai pangsa pasar dunia. Daya saing China didapatkan dari sistem ekonomi sosialis

yang diterapkan didalam negeri dan sistem kapitalis dalam hubungan perdagangan dengan negara lain. Sebaliknya Amerika juga tidak murni menganut sistem kapitalis, karena dengan liberalisasi yang tinggi telah berdampak pada kurang kompetitifnya produk domestik dibanding negara lain. Hal ini disebabkan biaya produksi domestik lebih tinggi dibanding negara lain. Artinya sistem ekonomi kedua negara tersebut tergolong menerapkan sistem ekonomi campuran. Walaupun kecenderungan sistem ekonomi Amerika masih liberal.

Hal ini juga terjadi pada sistem perekonomian Indonesia yang mengalami perubahan dari beberapa periode kepemimpinan. Saat orde lama, Indonesia pernah menerapkan sistem ekonomi liberal dan terpimpin. Selanjutnya di era orde baru sistem ekonomi liberal lebih cenderung dominan digunakan. Hal ini ditandai dengan tumbuhnya perusahaan-perusahaan multi nasional serta kebijakan devisa bebas oleh Bank Indonesia. Hasil yang didapatkan memang cukup signifikan dibanding era orde lama, dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai tingkat tertinggi sepanjang sejarah perekonomian Indonesia, yakni di atas 10% (tahun 1968) dan di tahun 1996 sebesar 7,8% (databoks.katadata.co.id 2018). Namun keterbukaan ekonomi tersebut membawa konsekuensi terhadap pengaruh gejolak ekonomi negara lain terhadap perekonomian Indonesia. Puncaknya saat terjadi krisis moneter di tahun 1998 akibat *contagion effect* dari terpuruknya nilai tukar Thailand. Setelah itu, sistem ekonomi Indonesia lebih terkontrol dengan dominasi intervensi pemerintah di pasar.

Dari fenomena perubahan sistem ekonomi baik dari negara barat (Amerika) maupun negara timur (China) dan Indonesia, menandakan setiap negara masih mencari sistem ekonomi yang tepat diterapkan di negaranya masing-masing. Hal ini diperkuat dengan permasalahan ekonomi baik ketimpangan

ekonomi, maupun kemiskinan belum mampu dipecahkan oleh sistem ekonomi yang sekarang ada. Oleh karenanya perdebatan antar sistem ekonomi yang terbaik masih menjadi topic utama untuk dipecahkan.

Gerakan perubahan sistem ekonomi telah terjadi di Indonesia sejak tahun 1980-an melalui pandangan sistem ekonomi ala Indonesia yang dikenal dengan sistem ekonomi Pancasila. Kritikan sistem ekonomi Pancasila terhadap sistem ekonomi liberal ditujukan pada adanya penguasaan oleh pemodal dan eksploitasi kaum buruh. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab ketimpangan ekonomi di suatu negara. Karena prinsip pasar bebas yang dianut sistem ekonomi liberal menyebabkan tidak adanya perlindungan bagi yang lemah dan adanya dominasi pemilik modal terhadap factor-faktor produksi.

Sistem ekonomi Pancasila yang ditawarkan oleh para ekonom di tahun 1980-an ditujukan untuk menjawab tujuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat tanpa kecuali. Namun seiring perkembangan ekonomi, konsep sistem ekonomi pancasila belum mampu dijabarkan secara konkrit dan ilmiah. Tantangan inilah yang membuat pengembangan sistem ekonomi Pancasila secara keilmuan berjalan lambat. Padahal pandangan sistem ekonomi Pancasila merupakan implementasi dari cara pandang bangsa Indonesia dalam mengatur negara berlandaskan Pancasila. Oleh karenanya, artikel ini ditulis dengan tujuan untuk menelaah sistem ekonomi pancasila melalui pendekatan filsafat ilmu. Hal ini penting sebagai pengembangan sistem ekonomi pancasila secara keilmuan, sehingga mendapat tempat di dunia akademisi.

Kajian ekonomi Pancasila telah dilakukan sejak zaman orde baru, tepat di tahun 1981. (Mangunpranoto 1981) menjelaskan filsafat ekonomi Pancasila secara epistemologis dan ontologis merupakan

ilmu humaniora. Artinya titik central Pancasila adalah “kemanusiaan”. Lebih lanjut Ki Sarino M menjelaskan filsafat ekonomi Pancasila terbentuk dari unsur filsafat ekonomi dan filsafat manusia. Perbedaan dengan teori ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis terletak pada filsafat manusia. Ekonomi kapitalis memandang manusia adalah *homo economicus*, sedangkan ekonomi sosialis memandang manusia tanpa nilai sacral dan sama dengan modal sebagai materi. Artinya tujuan hidup manusia sama-sama dipandang dari aspek materi. Sedangkan ekonomi Pancasila yang dimaksud Ki Sarino memandang manusia memiliki hubungan hidup tidak hanya dengan manusia namun juga berhubungan langsung dengan Tuhan YME, sehingga dibutuhkan keseimbangan hidup materi dan rohani. Dalam hal ini materi bukan menjadi tujuan tunggal atau materi menguasai manusia, sebaliknya manusia yang memiliki materi.

Hidajat Nataatmadja (H 1981) menjelaskan perbedaan filsafat ekonomi yang diterapkan ekonomi kapitalis dengan ekonomi Pancasila. Landasan ekonomi kapitalis adalah kepuasan konsumtif, sedangkan ekonomi Pancasila dibentuk dari kepuasan kreatif. Konsumtif identic dengan sifat hewani yang tidak memperhatikan kaidah moral. Sedangkan kreatif berasal dari ciri khas manusia yang ber Tuhan. Lebih lanjut Hidajat menjelaskan ekonomi Pancasila dengan 3 teori baru, yakni : teori kesadaran, teori kreativitas dan hukum dasar keberadaan. Hakikat sila pertama dijelaskan dari manifestasi sistem referensi agama, sila kedua bersumber dari manifestasi global humanistic, sila ketiga merupakan manifestasi referensi nasional. Sila keempat dan kelima tidak bisa dijelaskan oleh teori ekonomi kontemporer yang terbukti dari teorema kemustahilan Arrow. Hanya manusia pancasilais yang telah mengenal khaliknya atau fitrahnya yang mampu menjawab

permusyawaratan perwakilan dan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagian besar ekonom Indonesia menjelaskan filsafat ekonomi Pancasila melalui sudut pandang konstitusi yang tercermin dalam Mukadimah UUD 1945, Pasal 33 dalam UUD 1945, arti harafiah ekonomi Pancasila yang terdiri dari filsafat ekonomi dan filsafat Pancasila serta filsafat manusia dan filsafat religious. (P. A 1981), (Rahardjo, Mencari Pengertian Tentang Pembangunan:

Sudut Pandangan Pancasila 1981), (PH 1981). (Yunus 1981) menambahkan dalam tulisannya bahwa sistem ekonomi yang terkandung dalam Pancasila terletak pada sila kelima “Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesiaa” dan keempat sila yang mendahuluinya dijelaskan untuk mewujudkan apa yang terkandung dalam sila kelima.

1.1. Kajian Ekonomi Pancasila dalam Perspektif Filsafat Ilmu

Metode yang digunakan untuk mengkaji sistem ekonomi pancasila melalui pendekatan filsafat ilmu. Dimana terdapat tiga dimensi yang harus dipenuhi dalam filsafat ilmu. Artinya sebuah pengetahuan menjadi ilmu harus memenuhi tiga dimensi yang ada didalamnya, yakni : ontologi, epistemologi dan aksiologi.

Sebagai tahap awal pengkajian sistem ekonomi Pancasila, kajian ini menggunakan pendekatan filsafat ilmu dalam aspek ontologi. Secara definisi ontologi berasal dari kata “ontos” yang berarti “berada (yang ada)”. Artinya studi atau pengkajian mengenai sifat dasar ilmu, dimana sifat dasar tersebutlah yang menentukan arti, struktur dan prinsip ilmu. Ontologi seringkali disebut metafisika dan cakupan bahasan ontology tentang realitas. Realitas yang dimaksud merupakan kenyataan yang menjelaskan tentang kebenaran. Ontologis juga berarti membahas tentang apa yang ingin kita ketahui, hakikat apa yang

dikaji (Karimah 2010). Dalam kajian ini, realitas yang dimaksud adalah Ekonomi Pancasila. Untuk memahami hakikat dari ekonomi pancasila perlu kajian untuk menjawab:

- Apakah sesungguhnya hakekat ekonomi pancasila ?
- Apakah ekonomi pancasila ini merupakan realitas materi saja?
- Adakah sesuatu dibalik keberadaan ekonomi pancasila?
- Apakah ekonomi pancasila terdiri dari satu bentuk unsur (monisme), dua unsur (dualism), pluralism, nihilisme atau agnostisime?

Bakhtiar (2004) menjelaskan tentang pengertian ontologis merupakan ilmu yang membahas tentang hakekat yang ada, yang merupakan ultimate reality baik yang berbentuk jasmani/konkret maupun rohani/abstrak.

2. Pembahasan

2.1. Hakikat Makro Ekonomi Pancasila Menurut UUD 1945

Lahirnya pandangan ekonomi Pancasila diawali dari arah pengelolaan ekonomi Indonesia yang diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Karena kata “Pancasila” merupakan pedoman hidup yang hanya dimiliki bangsa Indonesia dan menjadi landasan UUD 1945. Sehingga aspek ontology pertama yang perlu kita bahas sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang dasar 1945 merupakan aturan yang menjadi arahan bagi penyelenggaraan negara baik dibidang alam, social dan humaniora. Ekonomi merupakan aspek social yang diatur dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1-5. Kemudian diperkuat dengan Pasal 27 ayat 2, Pasal 28D ayat 2, dan pasal 28 H ayat 1-4. Sebelumnya, (Bawazier 2017) juga menggunakan pasal 33 UUD 1945 untuk menerangkan system ekonomi Pancasila.

Hakekat yang terkandung dalam pasal 33 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan social menerangkan landasan pengaturan ekonomi negara secara makro. Terdapat nilai-nilai penting yang menjadi pedoman pengaturan ekonomi negara, yakni :

- Kekeluargaan
- Kebersamaan
- Kemandirian
- Keseimbangan kemajuan dan kesatuan

Keempat nilai tersebut merupakan gambaran makro ekonomi dengan sistem ekonomi pancasila yang menghendaki pemerataan dan pertumbuhan (kemakmuran) berjalan seiring, artinya pertumbuhan yang merata, bukan pertumbuhan dulu baru pemerataan. Hal ini merupakan hakekat dari nilai keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan. Nilai kekeluargaan dan kebersamaan memiliki hakekat bahwa untuk mencapai tujuan negara, yakni kesejahteraan umum dan keadilan social, maka pengelolaan ekonomi negara dilakukan secara bersama-sama dan mengedepankan nilai kekeluargaan. Artinya ekonomi pancasila tidak menghendaki adanya persaingan antar individu, karena kesejahteraan umum dan keadilan social tidak bisa dicapai dengan prinsip persaingan. Persaingan antar inividu merupakan nilai ekonomi yang dianut oleh sistem ekonomi kapitalis melalui sistem pasar. Prinsip persaingan ini akan membawa dampak negative bagi salah satu pihak akibat kalah dalam bersaing. Maka dengan demikian sistem persaingan tidak mampu menjawab tujuan negara Indonesia.

Hakikat pasal 27 ayat 2 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” mengandung arti dalam pelaksanaan sistem ekonomi Pancasila, hak individu untuk mendapatkan kehidupan yang layak juga dipertimbangkan. Artinya sifat kebersamaan dan pemerataan tanpa menghilangkan hak individu untuk peningkatan taraf hidup melalui pekerjaan sesuai keinginan dan kemampuannya. Hal ini diperkuat dengan pasal 28 D no 2 “Hak untuk

bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”, mengandung arti adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia untuk pengembangan diri serta perlakuan yang manusiawi. Kedua pasal ini mencirikan nilai kemandirian dalam sistem ekonomi Indonesia. Artinya prinsip kebersamaan dalam pengelolaan ekonomi bukan berarti setiap individu menjadi bergantung kepada individu lainnya. Melainkan kemajuan individu menjadi hak seluruh rakyat tanpa kecuali sesuai dengan keinginan dan keahliannya masing-masing.

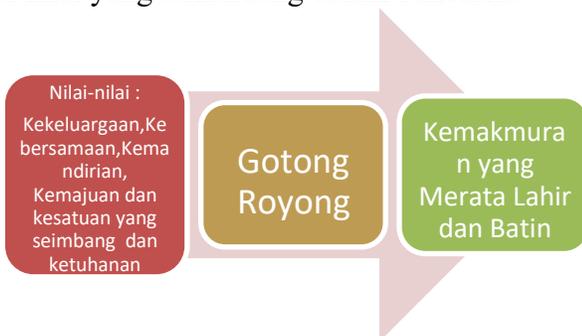
Kebersamaan yang dimaksud dapat mendorong kemajuan bersama melalui sikap saling mendukung potensi yang terdapat pada masing-masing individu demi mencapai tujuan bersama. Artinya sistem ekonomi pancasila mengedepankan kepentingan bersama dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak individu untuk berkembang dan maju. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang membatasi kebebasan individu untuk berkembang dan maju.

Pasal 28 H ayat 1 hingga 4 memperkuat penyelenggaraan sistem ekonomi di Indonesia. Dalam hal ini setiap warga negara berhak untuk hidup sejahtera materi dan batin. Artinya kesejahteraan yang dimaksud tidak hanya bersumber dari materi, namun juga kesejahteraan yang sifatnya non-materi. Dimana terdapat nilai ketuhanan yang menjadi sumber rohani setiap individu. Maka terdapat nilai Ketuhanan yang menjadi landasan dalam mewujudkan kesejahteraan materi dan batin. Hal ini menggambarkan bahwa negara menjunjung tinggi kebutuhan hidup manusia yang sesungguhnya yakni jasmani dan rohani.

Keseimbangan inilah yang menjadi ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dan negara bertanggung jawab untuk memenuhi hak jaminan social bagi seluruh rakyatnya tanpa kecuali. Peran pemerintah menjadi sentral dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat. Jadi peran pemerintah secara makro adalah membuka akses seluas-luasnya bagi seluruh warga negara untuk

menikmati kesejahteraan materi dan batin. Upaya-upaya yang merintang hal tersebut menjadi kewenangan pemerintah untuk menindaknya baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri. Artinya pemerintah berperan penting dalam system proteksi ekonomi. Hal ini berbeda dengan system ekonomi kapitalis yang memiliki prinsip liberalisasi atau kebebasan, dimana system proteksi dilakukan seminimal mungkin. Namun sejak krisis finansial dan kebangkitan ekonomi China menyebabkan Amerika sebagai negara penganut system kapitalis melakukan proteksi ekonomi dalam bentuk hambatan tariff. Hal ini bertentangan dengan prinsip liberalisasi ekonomi yang mereka anut. Kenyataan tersebut dapat menjelaskan bahwa secara natural terdapat sifat nasionalis dari setiap negara untuk melindungi kepentingan negaranya.

Sehingga dari uraian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan ekonomi di Indonesia ditujukan untuk mencapai kesejahteraan yang merata baik materi maupun batin. Untuk mewujudkannya dibutuhkan nilai-nilai yang dianut yakni kekeluargaan, kebersamaan, kemandirian, kemajuan dan kesatuan yang seimbang, dan Ketuhanan. Yang kesemuanya itu merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.



Proses Sistem Ekonomi Pancasila Menurut UUD 1945

Tujuan negara akan dicapai dengan kerjasama, kekeluargaan dan persatuan melalui Gotong Royong. Merujuk pada pandangan

Bung Karno (Sukarno 2005)) bahwa “Djiwa Indonesia adalah djiwa gotong royong, djiwa persaudaraan, djiwa kekeluargaan, dan kita telah menemukan djiwa yang demikian itu dengan apa yang dinamakan Pantja Sila”. Sehingga pada prinsipnya sistem ekonomi pancasila terdiri dari dua unsur (dualism) dalam mendefinisikan kesejahteraan, yakni materi (lahir) dan batin (rohani) yang dapat dicapai dengan Gotong Royong.

2.2. Hakikat Ekonomi Pancasila Berdasarkan Definisi Harafiah

Kajian ontologis selanjutnya dalam mencari hakikat sistem ekonomi pancasila adalah melalui definisi harafiah. Dalam hal ini, sistem ekonomi pancasila terdiri dari dua elemen yakni ekonomi dan pancasila. Oleh karenanya untuk menjawab hakikat ekonomi pancasila, diperlukan pemahaman akan hakikat ekonomi dan hakikat pancasila.

Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata : oikos dan nomos. “Oikos” mengandung arti rumah dan “Nomos” artinya aturan atau peraturan. Sehingga jika digabung menjadi satu “oikos nomos” berarti pengelolaan rumah tangga. Dalam hal ini hakikat ekonomi merupakan suatu sistem cara pengelolaan rumahtangga. Rumahtangga yang dimaksud mulai dari rumah tangga individu, keluarga hingga negara.

Pertanyaan selanjutnya adalah siapakah yang mengatur atau mengelola rumahtangga tersebut?. Jawabannya tentu saja manusia, namun manusia seperti apakah yang mampu mengelola rumahtangganya dengan baik. Oleh karenanya bermunculan sistem ekonomi yang memiliki perbedaan satu sama lain dalam hal pemaknaan pelaku ekonomi.

Sistem ekonomi kapitalis terdiri dari dua kata, yakni ekonomi dan kapitalis. Sehingga jika digabung berarti sistem pengelolaan rumahtangga yang mengedepankan kepemilikan materi sebagai roda penggerakannya. Dengan

prinsip kebebasan bagi hak-hak individu dalam menguasai dan memiliki materi. Pemikiran barat (Amerika) menerapkan prinsip kebebasan. Hal ini dilatar belakangi oleh sejarah Amerika yang didominasi imigran, yang lari dari negaranya untuk mencari kebebasan individu. Maka tidak heran prinsip kapitalis menjadi tawaran yang cukup menarik untuk mencapai kesejahteraan yang dimaksud.

Begitupun juga dengan sistem ekonomi sosialis, yang terdiri dari dua kata yaitu ekonomi dan sosialis. Artinya sistem pengelolaan rumahtangga yang mengedepankan kepemilikan materi secara merata untuk setiap individu dengan pemerintah sebagai pengaturnya. Peran pemerintah sangat tinggi dalam mengatur setiap individu dalam kegiatan ekonomi, konsekuensinya kebebasan individu menjadi semakin terbatas.

Selanjutnya, bagaimana dengan hakikat ekonomi pancasila secara harafiah, apa yang membedakan dengan kedua sistem ekonomi tersebut. Tentunya, secara harafiah terlihat bahwa perbedaannya terletak pada kata "pancasila". Sehingga jika digabungkan antara ekonomi dan pancasila mengandung arti pengelolaan rumahtangga dengan prinsip pancasila. Selanjutnya prinsip pancasila seperti apa yang dimaksud?. Dalam hal ini Pancasila merupakan ideology sekaligus pedoman hidup bernegara bagi bangsa Indonesia. Sehingga untuk memahami hakikat dari pancasila, kita harus memahami hakikat dari setiap sila yang terdapat didalamnya.

a. Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai hidup pertama yang terdapat didalam pancasila adalah kesadaran bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga karena sebagai ciptaan, maka segala perilakunya harus sesuai dengan perintah sang pencipta. Ketuhanan Yang Maha Esa juga menjelaskan bahwa Tuhan

adalah tunggal atau esa, yang dapat diartikan kebenaran itu satu, tidak ada kebenaran yang mendua. Implikasinya setiap agama meyakini bahwa Tuhan itu ada. Walaupun berbeda-beda dalam hal ritual dan pemahamannya, namun terdapat keyakinan yang sama bahwa Tuhan itu ada dan pencipta alam semesta termasuk manusia.

Hal ini dijelaskan dalam berbagai kitab suci, baik alquran bagi umat muslim, alkitab bagi umat Kristen dan katolik, weda bagi umat hindu, tripitaka bagi umat budha, dan wu-jin serta si shu bagi umat konghuchu. Keberadaan Tuhan menurut alquran tercantum dalam surat Yunus ayat 3 (RI 2016), yang berbunyi "Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah Yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorangpun yang akan memberi syafa'at kecuali sesudah ada izinNya. yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Keberadaan Tuhan menurut Al-kitab tercantum dalam Surat Ibrani (11) ayat 6 (alkitab 2006)

"Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia".

Keberadaan Tuhan menurut kitab Weda tercantum dalam **R.W.X.121.8** (Maswinara 2004)

"Siapakah yang akan kami puja dengan segala persembahan ini? Ia Yang Maha Suci yang kebesaran-Nya mengatasi semua yang ada, yang memberi kekuatan spiritual dan yang membangkitkan kebaktian, Tuhan yang berkuasa. Ia yang satu itu, Tuhan di atas semua"

Keberadaan Tuhan menurut kitab tripitaka tercantum dalam ungkapan dari sang

Buddha yang terdapat dalam sutta pitaka, udana VIII : 3, yang merupakan konsep Ketuhanan Yang Maha Esa dalam agama Buddha. Ketuhanan yang Maha Esa dalam bahasa Pali adalah *Atthi Ajatan Abhutam Akatam Asamkhatam* yang artinya : “suatu yang tidak dilahirkan, tidak dijelma, tidak diciptakan dan yang mutlak”.

“ketahuilah para bikkhu bahwa ada sesuatu yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak tercipta, yang mutlak. Duhai para bikkhu, apabila tidak ada yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak tercipta, yang mutlak, maka tidak akan mungkin kita dapat bebas dari kelahiran, penjelmaan, pembentukan, pemunculan dari sebab yang lalu. Tetapi para bikkhu, karena ada yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak tercipta, yang mutlak, maka ada kemungkinan untuk bebas dari kelahiran, penjelmaan, pembentukan, pemunculan dari sebab yang lalu”.

Keberadaan Tuhan menurut kitab agama konghucu yakni wu-jin dan shi-shu tercantum dalam Zhong Yong Bab Utama Pasal 1 (Sishu 2012)

“Firman Tian-Tuhan Yang Maha Esa (Tian Ming) itulah dinamai watak sejati (Xing). Hidup mengikuti watak sejati itulah dinamai menempuh Jalan Suci (Dao). Bimbingan menempuh jalan suci itulah dinamai Agama (Jiao)”

Artinya sifat ketuhanan bagi seluruh agama yang ada di Indonesia adalah kebenaran yang Esa atau tunggal. Hal ini menjelaskan dalam menjalankan hidupnya, manusia tidak bisa lepas dari hubungannya dengan Tuhan YME. Sehingga terdapat kebutuhan rohani atau spiritual dalam diri setiap manusia. Dalam agama islam disebut hablumminallah atau hubungan manusia dengan Tuhannya.

b. Sila Kedua hingga Kelima

Menjelaskan nilai persatuan, kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan social. Keempat nilai tersebut merupakan cerminan manusia yang berakhlak dan berbudi pekerti yang baik. Artinya manusia yang seperti ini tidak mungkin bisa diwujudkan jika manusia tersebut tidak memiliki kesadaran penuh sebagai manusia yang bertuhan. Percaya akan Tuhan hakikatnya meyakini seluruh tingkah laku dirinya dilakukan berdasarkan perintah Tuhan YME, yakni bermanfaat bagi sesama. Sila kedua hingga keempat ini menjelaskan hubungan antar sesama manusia hidup didunia.

Dalam perspektif agama islam disebut Hablumminannas atau hubungan baik antar sesama manusia di dunia.

Perilaku baik antar sesama umat manusia didunia mengandung dua tujuan, yakni pertama Setiap agama selalu mengajarkan welas asih atau kasih sayang kepada sesama umat manusia tanpa kecuali. Hal ini dijelaskan dalam salah satu kitab suci al-quran surat Al-Qasas ayat 77

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu kebahagiaan akherat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Petikan ayat tersebut merupakan salah satu contoh bahwa setiap manusia harus berbuat baik dan bermanfaat bagi sesama, serta menegaskan jika ingin menjalankan perintah Tuhan YME maka hindari tindakan yang dilarang-Nya seperti membuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan yang dimaksud tidak hanya terhadap alam sekitar tetapi memerangi

sesama manusia melalui menyakiti, pertengkaran, penjajahan, penguasaan dan lain sebagainya.

Berdasarkan definisi harfiah diatas, menunjukkan bahwa ekonomi pancasila menghendaki keseimbangan (*balance*) antara kebutuhan jasmani dan rohani. Sehingga untuk mewujudkannya, terdapat dua unsur dalam ekonomi pancasila, yakni kemanusiaan dan ketuhanan atau jika digabung menjadi pengelolaan rumahtangga oleh manusia yang menyadari sebagai makhluk ciptaan tuhan.

Keseimbangan kebutuhan jasmani dan rohani menjadikan pengelolaan negara dapat mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Sehingga dalam hal ini terdapat kebutuhan jasmani yang disebut *hard need* dan kebutuhan rohani yang disebut *soft need*.



Kebutuhan Manusia dalam Ekonomi Pancasila

Artinya ekonomi pancasila menawarkan konsep yang tidak hanya kebahagiaan semu, yang bersifat duniawi, namun juga kebahagiaan sejati yang terdapat didalam batin sebagai bekal menuju akhirat.

Oleh karenanya, maka definisi manusia sebagai pelaku ekonomi menjadi hal yang penting atau krusial dalam menjelaskan manusia seperti apa yang mampu menjawab tujuan ekonomi Pancasila ?. Pertanyaan tersebut dijelaskan dalam kerangka mikro ekonomi Pancasila.

2.3. Hakikat Mikro Ekonomi Pancasila Menurut Definisi Manusia yang Berakal

Secara Mikro ekonomi unsur utama yang menjadi pelaku ekonomi adalah manusia. Cara pandang manusia sangat mempengaruhi

perilakunya dalam mengambil keputusan. Sehingga hakikat manusia menjadi penting sebagai pondasi dalam memahami perilaku pelaku ekonomi. Ekonomi Kapitalis memandang manusia sebagai makhluk *homoeconomicus* yaitu manusia yang selalu mengejar kepentingan (keuntungan) sendiri (M 2007).

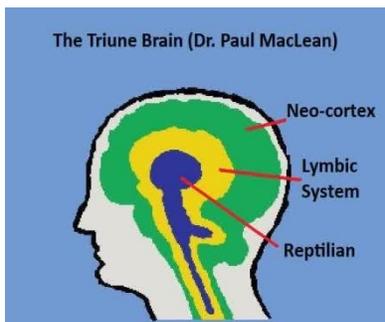
Atas dasar pandangan inilah, maka tidak heran jika tujuan utama ekonomi kapitalis mementingkan kepentingan individu, kebebasan pemilikan hak-hak pribadi melalui sistem pasar bebas. Dengan demikian pengelolaan rumah tangga baik individu maupun negara mementingkan keuntungan atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini identic dengan pengelolaan negara dengan modal materi atau kekayaan, serta ukuran kemakmuran suatu negara dilihat berdasarkan besarnya jumlah materi yang dimiliki oleh negara tersebut.

Sistem ekonomi kapitalis mendapat perlawanan dari sistem ekonomi sosialis, akibat timbulnya kesenjangan yang tinggi antara kaum pemodal dengan kaum buruh. Kritikan ekonomi sosialis memandang bahwa manusia adalah makhluk *social*. Artinya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa ketergantungan dengan lainnya. Namun pengelolaan rumahtangga baik individu maupun masyarakat diatur sepenuhnya oleh negara. Hal ini ditujukan untuk menghilangkan adanya dominasi antar satu individu terhadap lainnya. Namun konsekuensi dari sistem ekonomi ini adalah terbatasnya hak-hak kebebasan individu, baik dalam berkarya maupun mendapat kehidupan yang lebih layak. Pandangan sosialis tersebut mengacu pada sifat *social* dan *komunal* dari manusia. Namun sifat *social* ini memiliki kelemahan karena lebih mengedepankan perasaan atau simpati dalam bertindak.

Berbeda dengan sistem ekonomi pancasila dalam memandang hakikat manusia. Pada dasarnya yang membedakan manusia

dengan makhluk lainnya didunia adalah akal. Artinya manusia diberi akal untuk mengambil sikap sesuai dengan tujuan manusia hidup didunia, yakni bermanfaat bagi sesama serta alam tempat tinggal manusia. Hal ini merupakan tujuan hidup manusia yang berpedoman pada perintah Tuhan YME. Untuk itu, hakikat manusia dapat didekati dengan pemahaman akal manusia yang terdapat di otak. Menurut Dr. Paul Maclean (Maclean

1990) yang membagi otak kedalam tiga bagian (the triune brain), yakni otak reptilian, lymbic dan neo cortex. Ketiga bagian otak tersebut dapat menjelaskan alasan atau sebab manusia berperilaku.



a. R-Kompleks (Reptile)

Bagian otak yang ukurannya paling kecil dibanding lainnya. otak reptile mencerminkan binatang bertubuh manusia. Perilaku yang mencerminkan binatang diantaranya persaingan, tidak bermoral, tidak beretika, tidak ada tata krama, mementingkan diri sendiri terutama tubuh (somatic or survival), rakus atau serakah, tidak peduli dengan lingkungan, tidak mengenal benarsalah, *teritoriality*, tidak mau bertanggung jawab, menyalahkan orang lain. Artinya perilaku tersebut lahir karena manusia lebih mengedepankan nafsu dalam setiap pengambilan keputusan.

Beberapa sifat tersebut merupakan hakikat manusia yang menjadi landasan berpikir dari sistem ekonomi kapitalis yakni persaingan, mementingkan diri sendiri dan rakus. Artinya,

jika pola pikir manusia lebih banyak didominasi oleh R-kompleks, maka nafsu akan dikedepankan dalam bertindak. Akibatnya timbul pola hidup yang konsumtif dan rakus. Hal ini juga dijelaskan oleh Thorstein Veblen dalam buku Alan Greenspan mantan Gubernur bank Sentral Amerika Serikat (G. A 2008) bahwa kebiasaan konsumtif individu tersebut merupakan cerminan kebiasaan orang untuk memamerkan bahwa ia memiliki uang sebanyak orang lain

(*conspicuous consumption*). Artinya setiap individu memiliki kecenderungan bersifat kompetitif dalam hal status. Konsep ini menjadikan ekonomi diartikan sebagai kebutuhan jasmani dari manusia yang harus dipenuhi. Sifatnya nafsu tidak pernah puas, sehingga jika konsep ekonomi menggunakan pemikiran nafsu, maka yang timbul adalah berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan jasmani tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan jiwa manusia yang berakal dan berbudi pekerti. Seharusnya R-kompleks digunakan sesuai peruntukannya saja yakni sikap reflex dari individu untuk melindungi diri ketika menghindari ancaman, perilaku konsumsi yang secukupnya dalam memenuhi kebutuhan jasmani untuk melangsungkan hidup. Sifat nafsu merupakan bagian dari diri manusia yang tidak bias dihilangkan, namun perlu dididik dan diarahkan penggunaannya dengan baik.

b. Lymbic System

Lymbic merupakan bagian otak tengah. Dalam hal ini, otak yang membungkus batang otak. Bagian ini berhubungan dengan perasaan atau emosi, diantaranya: marah, sedih, jijik, kecewa, takut, senang, dan bahagia. Jika cara berpikir manusia didominasi oleh bagian otak lymbik, maka sifat-sifat yang dihasilkan akan mengedepankan perasaan dalam setiap pengambilan keputusan. Sifatnya iba,

melankolis tidak menerima penindasan atas satu dengan yang lainnya.

Akibatnya memunculkan sikap pengambilan keputusan yang memandang semua manusia harus diperlakukan sama untuk mencapai keadilan. Hal tersebut dapat dipenuhi dari peran pemerintah dalam mewujudkannya. Pandangan inilah yang menjadi hakikat manusia menurut sistem ekonomi sosialis. Tidak hanya materi saja yang dibutuhkan manusia namun juga kehidupan antar sesama manusia menjadi pertimbangannya.

Terdapat kebersamaan dan kesetaraan sebagai manifestasi kehidupan social manusia. Namun, cara pemikiran ini dapat menjadi boomerang karena mengedepankan perasaan. Manusia bisa terkecoh bahkan menjadi tidak bisa membedakan mana yang patut dibantu mana yang tidak. Karena tidak semua orang jujur dan mau untuk disamakan dengan yang lain. Maka timbul pemberontakan menuntut kebebasan dalam bertindak dan menentukan nasibnya sendiri.

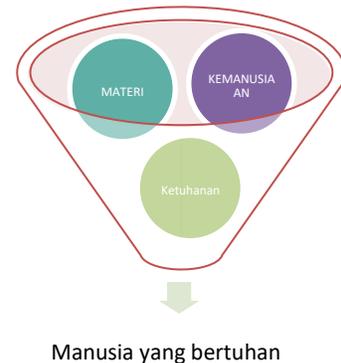
Definisi manusia dengan cara pandang limbic juga tidak cukup untuk menjawab hakikat manusia seutuhnya, berakal dan berbudi pekerti. Karena jika perasaan lebih mendominasi akal, akibatnya timbulnya fanatisme atau pemihakan kebenaran atas dasar perasaan (intuisi) tanpa didukung dengan bukti (akal).

c. Neocortex

Neocortex merupakan otak baru, berusia lebih muda sekitar 40.000 tahun. Disinilah tempat bersemayamnya kecerdasan yang bisa membuat perbedaan antara manusia dengan binatang. Otak kiri berisi kecerdasan dan otak kanan berisi kesadaran spiritual. Di dalam neo cortex terdapat satu titik yang merupakan titik focus manusia yang berhubungan dengan Tuhan, yang disebut God Spot. Kombinasi antara kecerdasan, kesadaran spiritual terhadap keberadaan Tuhan inilah yang menjadi landasan manusia bermoral atau berakhlak baik. Hal ini

sesuai dengan dasar rumpun ilmu ekonomi yakni filsafat moralitas.

Manusia yang menggunakan akalnya dengan dominasi neo-cortex akan memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan binatang, diantaranya welas asih (kasih sayang), toleransi, kepedulian terhadap sesama, memberi maaf, dan menghormati orang lain. Sifat-sifat ini sesuai dengan cara pandang bangsa Indonesia dalam memperlakukan manusia sebagai pelaku ekonomi. Sehingga hakikat manusia seutuhnya adalah manusia yang menyadari akan keberadaan tuhan dan berhubungan langsung dengan dirinya. Hal inilah sebagai control terhadap perilaku manusia yang menyimpang. (Swasono 2009) juga menyinggung tentang nilai-nilai afaktif yang melekat pada manusia rasional diabaikan dalam aliran ekonomi mainstream.



Elizabeth Svoboda (E 2013) menjelaskan dalam bukunya bahwa setiap manusia memiliki sisi heroic dalam dirinya. Sifat kepahlawanan ini merupakan cerminan tindakan tidak egois, emphatic dari diri manusia untuk bermanfaat bagi sesamanya tanpa pamrih. Inilah sifat manusia yang menunjukkan bahwa manusia menjalankan perannya sebagai manusia yang bertuhan.

Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi pancasila, hal mendasar yang membedakan dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis adalah dalam pendefinisian hakikat manusia seutuhnya. Berdasarkan ketiga uraian bagian

otak manusia, dapat disimpulkan bahwa manusia pada hakikinya memiliki nafsu, perasaan dan logika (akal) sebagai anugerah dari Tuhan YME. Artinya hakikat manusia yang mencerminkan manusia Pancasila adalah manusia yang mampu menggunakan logika serta kesadaran spiritualnya untuk mengatur secara bijaksana elemen nafsu dan perasaan yang ada di dirinya. Implikasinya adalah keberadaan materi sebagai perwujudan dari nafsu dan sisi social antar manusia sebagai perwujudan perasaan adalah dibawah kendali logika dan kesadaran spiritual. Inilah wujud dari manusia yang bertuhan.

Hakikat manusia yang bertuhan inilah yang sesuai dengan prinsip sistem ekonomi pancasila. Dalam hal ini, prinsip gotong royong sebagai cara untuk mencapai kesejahteraan materi dan batin dapat dicapai dengan kesadaran manusia yang bertuhan. Kesadaran inilah yang menumbuhkan sifat-sifat mulia seperti kepedulian antar sesama. Sehingga pada akhirnya manusia-manusia yang saling peduli satu sama lain akan bahumembahu bekerjasama untuk mendahulukan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi.



Tahapan Jiwa Gotong Royong

Berdasarkan kajian ontologis sistem ekonomi pancasila dari definisi otak manusia, dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi pancasila merupakan sistem yang diatur oleh manusia yang bertuhan dengan mengedepankan sifat kepedulian antar sesama umat manusia tanpa kecuali untuk mencapai tujuan bersama melalui gotong royong.

3. Ketahanan Ekonomi Indonesia dengan Sistem Ekonomi Pancasila

Secara ontologis ketahanan ekonomi merupakan gabungan dari hakikat ketahanan dan

ekonomi. Dalam hal ini sistem ekonomi yang kita bahas sebelumnya adalah sistem ekonomi pancasila. Sehingga ketahanan ekonomi yang dimaksud haruslah sesuai dengan nilai-nilai ekonomi pancasila.

Hakekat dari ketahanan adalah daya atau kemampuan untuk menjaga kestabilan saat terjadi gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Kestabilan mengandung makna terdapat dua unsur yang dijaga agar tidak terjadi instabilitas. Hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi pancasila yang secara ontologis terdiri dari dua unsur, yakni jasmani (materi) dan rohani (batiniah). Artinya kehebatan atau ketangguhan suatu negara dari sisi fisik (materi) pasti juga menimbulkan celah jika tidak diimbangi dengan kekuatan non-fisik. Kekuatan non-fisik inilah yang menjadi perbedaan dalam menjelaskan ketahanan ekonomi Indonesia dengan landasan ekonomi pancasila. Kekuatan non-fisik ini disebut *soft skill* ekonomi.

Stabilitas ini tidak hanya berlaku pada aspek makro ekonomi (negara), namun juga stabilitas mikro (individu) menjadi pondasi penting bagi ketahanan ekonomi di Indonesia. Oleh karenanya ketahanan ekonomi di Indonesia terdiri dari kajian ketahanan ekonomi individu (mikro) dan ketahanan ekonomi negara (makro).

3.1. Ketahanan Ekonomi Mikro

Hasil kajian menggambarkan ketahanan ekonomi pancasila merupakan cerminan ketahanan individu sebagai perwujudan manusia yang bertuhan. Ketahanan ekonomi pancasila merupakan suatu konsep yang mempertimbangkan keseimbangan atau stabilitas kebutuhan jasmani dan rohani. Stabilitas ekonomi individu merupakan cerminan stabilitas ekonomi suatu negara.

Sehingga dalam perspektif ketahanan ekonomi Indonesia, dapat didefinisikan

ketahanan ekonomi individu secara mikro adalah kemampuan individu untuk menjaga stabilitas atau keseimbangan kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani (batiniah). Jika terdapat kelebihan pemenuhan kebutuhan salah satu aspek tersebut maka akan terjadi ketimpangan. Hal inilah yang akan menimbulkan perilaku manusia yang melenceng dari hakikatnya sebagai manusia. Contohnya perilaku korupsi, merupakan cerminan ketimpangan kebutuhan jasmani dan rohani. Karena orang yang melakukan tindak korupsi selalu merasa dirinya kurang secara materi, walaupun pada kenyataannya memiliki nominal yang berlebih. Hal ini terjadi karena kurang terpenuhinya kebutuhan rohani sebagai wujud hubungan spiritual kepada Tuhan YME dalam menjalankan perintahnya. Artinya tidak adanya sikap bersyukur yang merupakan wujud kebutuhan rohani dalam memandang materi yang diperolehnya. Atau kurangnya kesadaran diri bahwa harta dan kekayaan merupakan anugerah Tuhan YME dan terdapat hak orang lain untuk dikeluarkan, bukan berasal dari usaha diri sendiri.

Sehingga dalam perspektif ketahanan ekonomi mikro, dibutuhkan formula untuk menjaga kestabilan individu dalam mengatur kebutuhan jasmani (materi) dan rohani (batiniah). Formula yang dimaksud adalah nilai kepedulian yang tercermin dalam ekonomi pancasila. Dimana jika setiap individu memiliki rasa kepedulian antar sesama, maka setiap tindakannya akan selalu memikirkan dampaknya bagi individu lainnya. Artinya terdapat *self control* di dalam diri karena adanya dominasi akal (neo-cortex) yang mengatur R-kompleks dan Lymbic.

Implementasinya secara matematis, kesejahteraan individu ditentukan tidak hanya bersumber dari diri sendiri, namun menjadi kebermanfaatannya bagi orang lain juga merupakan sumber kesejahteraan. Sehingga kebutuhan individu akan selalu terkontrol dengan baik,

tidak hanya memikirkan keluarga, namun juga lingkungan dan masyarakat secara luas.

3.2. Ketahanan Ekonomi Makro

Dalam aspek makro, ketahanan ekonomi yang dimaksud adalah ketahanan ekonomi Nasional. Sesuai dengan hakikat ekonomi pancasila secara makro (UUD 1945), maka ketahanan ekonomi nasional merupakan kekuatan atau ketangguhan negara dalam menjaga stabilitas ekonomi guna mewujudkan kemakmuran masyarakat lahir dan batin bagi seluruh rakyat tanpa kecuali. Stabilitas yang dimaksud dalam menjaga keseimbangan antara pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Artinya pertumbuhan ekonomi yang dimaksud merupakan pertumbuhan ekonomi yang merata. Hal ini sekaligus menunjukkan dengan adanya pertumbuhan yang merata merefleksikan tercapainya keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sistem ekonomi pancasila menghendaki adanya nilai kekeluargaan, kemandirian, kebersamaan dan ketuhanan dalam mengelola ekonomi negara menjadi kuat dan tangguh dalam menghadapi segala tantangan, ancaman dan hambatan baik berasal dari dalam maupun luar negeri. Nilai-nilai tersebut terkristalisasi menjadi satu nilai yakni GOTONG ROYONG.

Artinya ekonomi yang tangguh dilakukan secara bersama-sama di atas kaki sendiri atau mandiri. Oleh karenanya perlu melibatkan seluruh elemen yang ada di masyarakat untuk bahu membahu mewujudkan cita-cita negara tersebut. Artinya peran pemerintah adalah PEMERSATU antar lapisanlapisan yang ada di masyarakat untuk menghadapi segala tantangan, hambatan dan ancaman yang sifatnya dinamis.

4. Simpulan

Hakekat sistem ekonomi Pancasila sebagai landasan ketahanan ekonomi Indonesia

dalam perspektif filsafat ilmu terdiri dari tiga kategori :

1. Secara makro, definisi sistem ekonomi pancasila dijelaskan dalam UUD Pasal 33 ayat 1 sampai 5, yang hakikatnya terdiri dari dua unsur (dualism) dalam mendefinisikan kesejahteraan, yakni materi (lahir) dan batin (rohani) yang harus dicapai secara merata melalui Gotong Royong.
2. Secara mikro ekonomi, mendefinisikan manusia dalam system ekonomi Pancasila adalah manusia yang bertuhan yang dijelaskan melalui komponen otak manusia, yakni neocortex yang menggambarkan suatu kesadaran setiap individu dalam berperilaku sebagai manusia yang bertuhan. Dalam hal ini perilaku manusia bersifat welas asih yang diimplementasikan dengan sikap peduli atau yang lebih dikenal dengan gotong royong.
3. Secara harafiah, hakikat ekonomi Pancasila terdiri dari filsafat ekonomi dan filsafat Pancasila. Ekonomi mencerminkan kebutuhan hidup manusia (rumah tangga individu, keluarga, dan negara), sedangkan Pancasila merupakan representative dari unsur manusia yang bertuhan. Sehingga system ekonomi Pancasila merupakan suatu system pengelolaan rumahtangga (materi) oleh manusia yang bertuhan (mengedepankan akal).
4. Sistem ekonomi Pancasila sebagai landasan ketahanan ekonomi Indonesia mampu menjelaskan kekuatan atau ketangguhan negara dalam menjaga stabilitas ekonomi yang terdiri dari dua unsur yakni soft skill ekonomi dan hard skill ekonomi baik dalam aspek mikro maupun makro ekonomi. Kedua kekuatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran lahir dan batin bagi seluruh rakyat tanpa kecuali dengan pertumbuhan merata melalui Gotong Royong

Referensi

A, G. (2008). *Abad Prahara : Ramalan*

Kehancuran Ekonomi Dunia Abad Ke21. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- A, P. (1981). *Aspek Religius-Spiritual Dalam Ekonomi Pancasila*. In Mubyarto&Boediono, *Ekonomi Pancasila* (p. 84). Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UGM.
- alkitab. (2006). Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.
- BA, M. T. (2017). *2017 Index of Economic Freedom*. USA: Institute for Economic Freedom, The Heritage Foundation.
- Bahrum. (2013). *Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi*. Sulesana, Vol 8 No. 2 .
- Bakhtiar, A. (2004). *Filsafat Ilmu*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Bawazier, F. (2017). *Sistem Ekonomi Pancasila : Memaknai Pasal 33 UUD 1945*. *Jurnal Keamanan Nasional* Vol III, No.2 .
- Boediono, M. &. (1981). *Ekonomi Pancasila*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UGM.
- databoks.katadata.co.id. (2018, Januari 31). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (1961-2018)*. Indonesia: www.databoks.katadata.co.id.
- E, S. (2013). *Makes a Hero?* Retrieved from <http://www2.centralcatholichs.com/copi-ed%20articles%20to%20review/Neuro/what%20makes%20a%20hero%20DISC%20sept%2013.pdf>.
- Gwartney, J. (2009). *Economic Freedom of The World 2009 Annual Report*. Economic Freedom Network.
- H, N. (1981). *Karsa Membangun Ilmu Ekonomi Pancasila*. In Mubyarto&Boediono, *Ekonomi Pancasila* (p. 21). Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UGM.
- Karimah, K. &. (2010). *Filsafat dan Etika Komunikasi, Aspek Ontologis,*

- Epistemologis dan Aksiologis dalam Memandang Ilmu Komunikasi. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Lavinda. (2018, September 4). Rupiah Makin Liar, Tembus Rp. 14.920 per Dolar AS. Jakarta: www.cnnindonesia.com/ekonomi/.
- M, S. (2007). *The Big Three in Economics : Adam Smith, Karl Marx and John Maynard Keynes*. M.E. Sharpe Inc.
- Maclean, P. (1990). *The Triune Brain in Evolution: Role in Paleocerebral Functions*. New York: Plenum Press.
- Mangunpranoto, K. (1981). *Dasar Filsafat Ekonomi Pancasila*. In Mubyarto&Budiono, *Ekonomi Pancasila* (p. 17). Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UGM.
- Maswinara, I. W. (2004). *Rg. Veda Samhita*. Surabaya: Paramita.
- Nasrullah, Y. (2007). *Peran Filsafat Ilmu terhadap Ilmu Ekonomi dan Pengembangan Para Sarjananya*. UNISIA Vol XXX No 65 .
- PH, S. (1981). *Sekelumit tentang sistem ekonomi pancasila ditinjau dari segi sosio-kultural*. In Mubyarto&Boediono, *Ekonomi Pancasila* (p. 99). Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UGM.
- Rahardjo, M. (1981). *Mencari Pengertian Tentang Pembangunan: Sudut Pandangan Pancasila*. In Mubyarto&Boediono, *Ekonomi Pancasila* (p. 49). Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UGM.
- Rahardjo, M. (2009). *Menuju Sistem Perekonomian Indonesia*. UNISIA Vol XXXII No 72 .
- RI, K. A. (2016). *Al-Qur'an dan Terjemahannya: dilengkapi tajwid warna*. Surabaya: CV. Rabita.
- Sishu, K. (2012). *Kitab Suci Agama Khonghucu*. Sala: Matakini.
- Soemitro, R. (1983). *Himpunan Kuliah : Pengantar Ekonomi dan Ekonomi Pancasila*. Bandung: PT. Eresco Jakarta.
- Sukarno. (2005). *Dibawah Bendera Revolusi Jilid Pertama Cetakan kelima*. Jakarta: Yayasan Bung Karno.
- Swasono, S. (2009). *Mengubah Pakem: Kompetensi dan Integritas Sarjana Ekonomi*. Retrieved from <https://www.bappenas.go.id>
- Wulandari, D. (2014). *Kebebasan Ekonomi di Indonesia*. JESP Vol 6 No 2 .
- www.bbc.com. (2018, Agustus 14). *Anjloknya Lira Turki : Negara-negara berkembang terdampak, sejauh apa pengaruhnya pada Indonesia?* Indonesia: www.bbc.com/indonesia.
- Yunus, H. (1981). *Nasionalisme Dalam Ekonomi Pancasila*. In Mubyarto&Boediono, *Ekonomi Pancasila* (p. 113). Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UGM.